

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemikiran

Pada dasarnya setiap negara yang berkembang itu menitikberatkan pada yang namanya infrastruktur dan kesejahteraan masyarakatnya, hal ini dapat dibuktikan dengan gaya pertumbuhan ekonomi yang pesat pula. Maka semua itu akan terwujud dengan adanya dukungan dari masyarakat itu sendiri, terlepas dari permasalahan diatas, dimana pajak merupakan salah satu poin pendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat besar pengaruhnya terhadap peningkatan pembangunan dan kelangsungan jalanya roda pemerintahan karena jumlahnya relative stabil. Dari sector pajak diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai rumah tangga Negara dan aktivitas pembangunan dapat diwujudkan secara nyata dengan melaksanakan sistem perpajakan.

Melaksanakan sistem perpajakan di Indonesia tidaklah terlalu mudah, karena masyarakat Indonesia harus mengerti pajak dan cara-cara perhitungannya, agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam perhitungan maupun pembayaran pajak, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan berupa perundang-undangan perpajakan. Undang-undang tersebut mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai subjek dan objek pajak maupun tata cara penghitungan pajak.

Pajak merupakan iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang turutang oleh wajib pajak, menurut undang-undang yang berlaku dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung atau dapat dinikmati secara langsung oleh wajib pajak yang ditujukan oleh pemerintah

guna membiayai pengeluaran Negara, berkaitan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah “*self assessment system*”, dimana sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang besar untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang pada wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan berkewajiban melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban wajib pajak.

Di Kota Gorontalo penerimaan PBB dari sektor perdesaan dan perkotaan merupakan penerimaan PBB yang cukup besar. Untuk tahun 2010, penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan sebesar Rp3.308.698.273 atau sekitar 30,66 persen dari total penerimaan daerah, (sumber data : DPPKAD). Pajak dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Gorontalo, yang semata-mata sebagai upaya untuk memaksimalkan terhadap penggalan sumber-sumber penerimaan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh daerah.

Sehingga, ini menjadi tuntutan tersendiri terhadap masing-masing kelurahan yang ada di kota Gorontalo untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan. Karena kita sadari ataupun tidak, pajak ini merupakan satu tonggak yang menentukan maju tidaknya pembangunan disuatu daerah, yang secara langsung ini dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat yang berada di kota Gorontalo pada umumnya.

Di Kelurahan Tuladengi Berdasarkan data awal yang diperoleh dari 920 (wajib pajak bumi dan bangunan) yang terbagi atas 2 lingkungan yakni : lingkungan 1: terdiri atas 315 (wajib pajak bumi dan bangunan) serta lingkungan 2: sejumlah 519 (wajib pajak bumi dan bangunan), yang kalau di hitung secara keseluruhan hanya 615 wajib pajak yang sudah membayar pajak atau

sekitar 70%, dan masih tersisa 30% atau 305 yang belum membayar pajak, (sumber data : Kasie Kesra Kelurahan Tuladenggi, Tahun 2012) .

Ada beberapa faktor yang menyebabkan sehingga pajak ini tidak berjalan dengan lancar, antara lain yakni faktor ekonomi, kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak, sosialisasi akan perpajakan, peranan lurah terhadap peningkatan pajak, waktu pembayaran pajak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga pajak ini tidak berjalan dengan lancar.judul yang diangkat penulis sehubungan dengan penulisan tugas akhir ini adalah “**Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo**”.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengidentivfikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih banyak masyarakat yang belum melunasi pajak.
2. Masih banyak masyarakat yang belum paham betapa pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan.
3. Masih banyak wajib pajak orang pribadi maupun badan yang belum mengetahui tata cara pembayaran pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis berupaya melakukan pendekatan makna mendasar pada beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi batasan penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam beberapa sub pokok masalah yakni :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat terlambat dalam membayar pajak di Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Duingi Kota Gorontalo.
2. Upaya Pemerintah Kelurahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kelurahan Tuladenggi dalam membayar pajak.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data baik data primer maupun data sekunder serta berbagai informasi yang diperlukan dalam tugas akhir dan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pembayaran pajak, serta mencari dasar teoritis yang didapat di perkuliahan dengan kenyataan yang sebenarnya.

Adapun yang menjadi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat terlambat dalam membayar pajak.
2. Untuk mengetahui Upaya Pemerintah Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kelurahan Tuladenggi dalam membayar pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai guna dan manfaat kepada :

- a. Kepada masyarakat penelitian ini akan memberikan informasi dan pengetahuan sampai sejauh mana aplikasi ilmu perpajakan sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia perekonomian yang semakin berkembang dan memiliki tuntutan yang besar.

- b. Kepada pihak pemerintah kelurahan dapat dijadikan pengetahuan tentang ilmu perpajakan dimasyarakat.
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini sebagai ajang penerapan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama dalam masa perkuliahan.